



**PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2020

**Nomor : S-1841/PW19/6/2020
Tanggal: 4 September 2020**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu 94234

Telepon dan Faksimile: (0451) 421920, E-mail: sulteng@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beligan Sembiring

Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muhammad Yusuf Ateh

Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 4 September 2020
Pihak Pertama,

Beligan Sembiring
NIP 19630814 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	66
	2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	132
	3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.123
	4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124
	5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	-
	6 Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	-
2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	-
	2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	2
	3 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	2
	4 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	-
	5 Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai	Program	-
	6 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	-
	7 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75
3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	-
	2 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	-
	3 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1
	4 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1
	5 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	58
4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
	2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70
	3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	-
	4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	-
5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	4
	2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	9
	3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	-
	4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	1
	5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	0,18
	6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
	7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	40
	8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	-
	9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
	10 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	-
	11 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	-
	12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BULD	-
	13 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level	BUMD	-
	14 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	82
	2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
	3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
	5 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	90
	6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90
	7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
	8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Kategori	Baik
	9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
	10 Nilai Reputasi Unit Kerja (khusus unit Perwakilan)	Indeks Skala 100	-
	11 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	12 Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	-
	13 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	80
	14 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75

Kegiatan	Anggaran
1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp 3.465.451.000
2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp 17.949.837.000
	Rp 21.415.288.000

Jakarta, 4 September 2020

Kepala BPKP

Kepala Perwakilan

Muhammad Yusuf Ateh
 NIP 19640809 198503 1 001


 Beligan Sembiring
 NIP 19630814 199303 1 001